



Article Informations
Corresponding Email:
rizkipr223@gmail.com

Received: 29/05/2026; Accepted:
05/06/2026; Published: 30/06/2026

DETERMINAN INDONESIA MEMILIH TURKI SEBAGAI MITRA PEMASOK SEWACO PADA FREGAT MERAH PUTIH

Muhammad Rizki Pratama

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Turki merupakan salah satu strategi penting dalam mendukung kebijakan diversifikasi alutsista Indonesia. Diversifikasi pertahanan ini dilatar belakangi oleh pengalaman pahit embargo dari negara-negara Barat, yang mendorong Indonesia untuk mencari mitra alternatif yang dapat menjamin kepastian pasokan persenjataan. Hal ini yang mendorong Indonesia untuk memilih turki sebagai mitra pemasok sistem senjata pada kapal fregat Merah Putih. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor domestik dan faktor internasional yang memengaruhi pemilihan Turki sebagai mitra strategis. Penelitian ini menggunakan kerangka teori realisme neoklasik, yang memandang kebijakan luar negeri sebagai hasil interaksi antara tekanan eksternal dalam sistem internasional dan faktor domestik yang berfungsi sebagai filter dari tekanan eksternal tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe eksplanatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Turki dipilih sebagai mitra strategis karena kemampuannya menyediakan alutsista dengan harga kompetitif, standar NATO, serta kesediaannya untuk melakukan transfer teknologi dan produksi bersama untuk mendukung kemandirian pertahanan nasional.

Kata Kunci: Indonesia, Turki, Embargo, Kemandirian, Diversifikasi

Abstract

Defense cooperation between Indonesia and Turkey is one of the key strategies in supporting Indonesia's defense equipment diversification policy. This defense diversification is driven by Indonesia's past experience of arms embargoes from Western countries, which pushed Indonesia to seek alternative partners that could ensure a reliable supply of weaponry. This consideration led Indonesia to choose Turkey as a supplier of weapon systems for the Merah Putih frigate program. This study aims to analyze both domestic and international factors influencing the selection of Turkey as a strategic partner. This study adopts the theoretical framework of neoclassical realism, which conceptualizes foreign policy as the product of an interaction between external pressures generated by the international system and domestic factors that mediate, filter, and shape the state's responses to those external stimuli. The research method used is qualitative with an explanatory approach. The

findings indicate that Turkey was chosen as a strategic partner due to its ability to provide defense equipment at competitive prices, with NATO standards, as well as its willingness to engage in technology transfer and joint production to support Indonesia's defense self-reliance.

Keywords: *Indonesia, Turkey, Embargoes, Self-reliance, Diversification*

1. PENDAHULUAN

Hubungan internasional menggambarkan bagaimana setiap negara memiliki kepentingan nasional terkait keamanan dan kedaulatan yang merupakan dua unsur utama yang senantiasa dijaga dan diperkuat. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan kebijakan pertahanan yang ideal dan mampu merespon dinamika ancaman yang terus berkembang. Dalam hal ini, negara-negara menggunakan instrumen militer untuk mencapai ketahanan nasional yang dimaksud (Hikmawanti, 2005). Dengan kata lain, dapat disiratkan bahwa instrumen militer merupakan salah satu unsur utama sebuah negara dalam upaya mempertahankan eksistensinya. Untuk itu, Indonesia memulai sebuah langkah untuk memperkuat pertahanan dan keamanan melalui kebijakan modernisasi jangka panjang.

Minimum Essential Force (MEF) adalah sebuah upaya jangka panjang Indonesia untuk memperkuat dan memodernisasi instrumen militernya. Seperti namanya, MEF ditujukan untuk mencapai kekuatan minimum dalam menghadapi ancaman potensial. Program ini dibagi ke dalam 3 tahap renstra atau rencana strategis yang dimulai pada tahun 2010 – 2014 yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, kemudian berlanjut pada renstra tahun 2015 – 2019 dan 2020 – 2024 yang berfokus pada memperbaiki kualitas teknologi dan meningkatkan kemandirian industri pertahanan (Adestria, Almubaroq, dan Risdhianto, 2024). Strategi pembangunan MEF dilaksanakan melalui pengembangan Trimatra yang diimplementasikan secara bertahap melalui rematerialisasi, revitalisasi, relokasi, dan pengadaan. Selain itu, Pembangunan kekuatan tersebut juga menggunakan prinsip *zero growth policy* dan *right sizing* serta mempertimbangkan aspek organisasi (Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2012). Hal ini dilakukan agar terciptanya komposisi personel TNI yang tangguh dan handal.

Dalam pengadaan Alutsista angkatan laut, Indonesia cukup konsisten dengan bergantung kepada pemasok tradisionalnya yaitu Amerika Serikat. Sejumlah kapal perang dan rudal anti kapal buatan Amerika Serikat menjadi tulang punggung kekuatan angkatan laut Indonesia. Namun sejak embargo yang dilakukan oleh Amerika Serikat, Indonesia beralih ke negara-negara Uni Eropa sebagai pemasok tradisionalnya. Sejumlah kapal perang dan inventaris angkatan laut lainnya banyak yang dibeli dari negara-negara Uni Eropa. Pada renstra MEF ke-1 Indonesia membeli fregat ringan kelas Nakhoda Ragam dari Inggris yang merupakan kapal pesanan Brunei Darussalam yang tidak jadi dikirim (tni.mil.id, diakses 25 Agustus 2025). Kemudian Indonesia membeli fregat kelas Raden Eddy Martadinata dari Belanda yang diproduksi dengan skema ToT, di mana PT PAL Indonesia bekerja sama dengan *Damen Schiede Naval Shipbuilding* (DSNS) untuk memproduksi kapal tersebut di dalam negeri dengan skema ToT (www.kemhan.go.id, diakses 25 Agustus 2025).

Selain platform kapal, Indonesia juga mengimpor sistem senjata lainnya dari negara-negara Uni Eropa seperti radar dan rudal. Indonesia menjadi pelanggan setia radar buatan negara-negara Uni Eropa seperti Thales dan juga rudal Exocet buatan MBDA Perancis. Radar dan rudal tersebut tidak hanya dipasang pada kapal-kapal buatan negara tersebut. Namun juga dipasangkan pada kapal-kapal perang buatan dalam negeri seperti kapal KCR-60M buatan PT PAL yang menggunakan rudal MM40 Exocet buatan MBDA Perancis dan CMS (*Combat Management System*) Terma buatan Hensoldt Jerman (www.navalnews.com, diakses 25 Agustus 2025).

Pada pengadaan di MEF ke-3 Indonesia tetap kembali mempercayai negara-negara Uni Eropa untuk memenuhi kebutuhan alutsista lautnya. Hal ini bisa dilihat pada pengadaan program upgrade MLM fregat kelas Bung Tomo yang diisi sistem senjata dari Perancis dan Inggris. Kemudian pengadaan lainnya yaitu pada fregat Merah Putih yang bekerja sama dengan Babcock Inggris dan diproduksi di galangan kapal PT PAL di Surabaya. Lalu yang paling terbaru adalah pengadaan kapal fregat PPA atau kelas Brawijaya yang dibeli dari Fincantieri Italia. Dipilihnya kembali negara-negara Uni Eropa untuk memasok sistem persenjataan angkatan laut menunjukan

kepuasan terhadap produk tersebut dan komitmen akan standarisasi di tubuh angkatan laut.

Meskipun begitu, pada renstra MEF ini juga Indonesia mulai melirik Turki sebagai pemasok Alutsista TNI. Setelah suksesnya kerja sama antara Indonesia dan Turki dalam pengembangan tank medium, Indonesia mulai meningkatkan kerja sama pertahanan dengan Turki. Pada renstra MEF ke-3, Indonesia mengakuisisi berbagai Alutsista dari Turki mulai dari Alutsista darat, laut, hingga udara. Dipilihnya negara pemasok non-tradisional dalam pengadaan Alutsista TNI merupakan kebiasaan lama yang muncul dari kekhawatiran embargo dari suatu negara. Akan tetapi, dalam pengadaan Alutsista laut Indonesia cukup konsisten dengan memilih negara-negara Uni Eropa sebagai pemasok utama. Namun dalam program fregat Merah Putih, Indonesia memutuskan untuk tidak lagi bergantung kepada negara-negara pemasok tradisionalnya tapi lebih memilih Turki sebagai pemasok utama sistem senjata pada kapal fregat Merah Putih. Indonesia menunjuk perusahaan pertahanan Turki seperti Aselsan, Meteksan, Roketsan, dan Havelsan untuk memasok sistem senjata dan sensor fregat tersebut (www.navalnews.com, diakses 25 Agustus 2025).

Fregat Merah Putih sendiri menggunakan basis kapal Arrowhead 140 Babcock yang menggunakan sistem persenjataan dari Inggris dan Perancis (euro-sd.com, diakses 25 Agustus 2025). Selain harus melakukan perubahan pada desain, pemilihan Turki pun membuat rendahnya komonalitas pada fregat Merah Putih dibanding dengan kapal perang TNI-AL lainnya saat ini. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus kepada alasan mengapa Indonesia memilih Turki sebagai mitra pemasok sistem senjata pada kapal fregat Merah Putih. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis alasan Indonesia dalam pengadaan sistem senjata dari Turki pada kapal fregat Merah Putih. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan terkait determinan kebijakan luar negeri Indonesia dalam hal pengadaan Alutsista pada fregat Merah Putih dari negara Turki.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk menjelajahi konteks, motif, dan pertimbangan strategis yang menjadi latar belakang diambilnya keputusan tersebut melalui

penelusuran data (Creswell, 2018). Metode penelitian kualitatif dipilih karena dipandang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian eksplanatif yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena, peristiwa, atau kebijakan dengan menghubungkan beberapa variabel (Mas'ood, 1994).

Penelitian ini menggunakan teori Realisme Neoklasik di mana Pendekatan ini berusaha menggabungkan antara tingkat analisa struktur seperti sistem internasional dalam Neorealisme dengan tingkat analisa unit dalam Realisme untuk menjelaskan perilaku sebuah negara dalam menjalankan politik luar negeri. Rose menyatakan bahwa Realisme Neoklasik meyakini kebijakan luar negeri (*dependent variables*) suatu negara ditentukan oleh *independent variables* (faktor eksternal), dan *intervening variables* (faktor internal) (Gideon, 1998).

2. PEMBAHASAN

DETERMINAN INDONESIA MEMILIH TURKI SEBAGAI MITRA PEMASOK SEWACO PADA FREGAT MERAH PUTIH

Independent Variables

1) Ancaman Embargo Militer Negara-Negara Barat

Embargo militer merupakan tindakan pembatasan atau pelarangan ekspor senjata dan peralatan militer dari suatu negara ke negara lain, biasanya dengan alasan politik, hak asasi manusia, atau kepentingan strategis. Pada tahun 1990-an, Indonesia mengalami salah satu momen bersejarah dalam hubungan internasional yaitu embargo militer. Negara-negara barat, terutama Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa menerapkan embargo terhadap penjualan dan bantuan militer kepada Indonesia. Hal ini dipicu oleh beberapa faktor, namun salah satu faktor utama adalah akibat dari dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Indonesia di Timor Timur pada tragedi 'Santa Cruz' tahun 1991 (Inkiriwang, 2020).

Embargo militer yang diterapkan kepada Indonesia berlangsung dalam waktu yang cukup lama yaitu dari tahun 1991 dan baru dicabut

pada tahun 2005 (www.armscontrol.org, diakses 25 Agustus 2025). Indonesia yang selama ini bergantung kepada alutsista buatan barat, khususnya Amerika Serikat sangat terdampak akibat dari embargo militer ini. Embargo militer yang diterapkan lebih dari satu dekade ini telah cukup melemahkan pertahanan militer Indonesia. Oleh karena itu, setelah berakhirnya embargo militer Indonesia memulai kembali langkah untuk memperkuat pertahanan dan keamanan.

Meskipun embargo militer telah dicabut oleh Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa pada tahun 2005, tetapi trauma dan ancaman terhadap hal tersebut masih menghantui Indonesia. Hingga saat ini negara-negara Barat masih memberlakukan embargo militer terhadap negara-negara yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan dan moral kompas mereka. Negara-negara seperti Iran, Suriah, hingga Myanmar sampai saat ini masih terikat oleh kebijakan embargo yang dilakukan oleh negara-negara Barat (worldpopulationreview.com, diakses 25 Agustus 2025). Selain negara-negara tersebut, Arab Saudi juga pernah menjadi target embargo oleh Jerman setelah terjadinya kasus pembunuhan terhadap jurnalis Jamal Khashoggi di kedutaan besar Arab Saudi di Turki pada tahun 2018 (Luerdi, dan Marisa, 2020). Embargo militer yang dilakukan tidak berupa embargo militer penuh, tetapi hanya terbatas pada penjualan senjata milik Jerman. Meskipun demikian, Arab Saudi sebagai pengguna senjata buatan Jerman terganggu dengan kebijakan tersebut.

a) CAATSA

Undang-Undang *Countering America's Adversaries Through Sanctions Act* (CAATSA) adalah kebijakan sanksi yang disahkan oleh Amerika Serikat pada tahun 2017 untuk menekan negara-negara seperti Rusia, Iran, dan Korea Utara melalui sanksi ekonomi dan militer (Parachini, 2021). CAATSA sendiri tidak hanya menasar negara-negara musuh Amerika Serikat tetapi juga dapat diterapkan terhadap negara ketiga, termasuk sekutu dan mitra strategis seperti Indonesia yang menjalin kerja

sama militer dengan entitas yang telah dikenai sanksi oleh pemerintah Amerika Serikat (Hasil Wawancara, 2025).

Pembelian Alutsista dari Rusia seperti pada kasus Sukhoi Su-35 misalnya, berisiko menimbulkan sanksi sekunder dari Amerika Serikat yang dapat mengganggu operasional dan kesiapan pertahanan Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia yang mengoperasikan alutsista buatan barat dalam jumlah yang besar (Parachini, 2021). Dengan adanya sanksi ini dapat menyebabkan kelumpuhan terhadap mayoritas armada pertahanan Indonesia yang bergantung pada suku cadang dan pemeliharaan dari Barat. Oleh karena itu, Indonesia sangat berhati-hati dalam melakukan pembelian alutsista dari Rusia seperti yang dikatakan oleh Komisaris Perdagangan Rusia Yaroslav Tarasyuk ketika berbicara tentang pengadaan Su-35 oleh Indonesia,

I talked to the Indonesian chief of the air force and he mentioned CAATSA, the US law. From what he says, I understand they receive threats. They are dependent not just on Russian equipment, they are dependent on a large part of US-made equipment. If as a punishment measure, let's say, American manufacturers stop supplying spares, stop supporting American-made equipment, then there will be a breach in security in national defence in Indonesia. So, they are very cautious (Garrett, 2019).

Dalam kondisi seperti ini, Indonesia harus mencari alternatif lain yang tidak akan membuat Barat dan khususnya Amerika Serikat 'merajuk', namun tetap dapat mengurangi ketergantungan dari negara-negara tersebut. Turki dilihat dapat menjadi mitra alternatif yang strategis untuk mencapai hal tersebut. Meskipun Turki merupakan anggota NATO, negara ini menunjukkan kebijakan pertahanan yang lebih otonom dan tidak selalu sejalan dengan kebijakan Amerika Serikat. Hal seperti ini terlihat dari pembelian sistem pertahanan udara S-400 dari Rusia oleh Turki yang sempat menuai ketegangan

dengan AS (Hasil Wawancara, 2025). Selain itu, Turki pernah mengalami pengalaman pahit di embargo oleh Barat seperti Indonesia.

Kerja sama Indonesia-Turki dalam pengadaan Alutsista menjadi jalan tengah yang memungkinkan Indonesia mendapatkan teknologi militer modern tanpa harus menghadapi risiko sanksi seperti dari CAATSA (Hasil Wawancara, 2025). Mempertimbangkan seluruh faktor tersebut, keputusan Indonesia untuk membeli senjata dari Turki merupakan strategi rasional untuk menghindari risiko kelumpuhan armada akibat sanksi embargo, menjaga kemandirian pertahanan, serta mempertahankan prinsip politik luar negeri bebas aktif dan non-blok yang menjadi landasan diplomasi Indonesia. Dengan demikian, Turki dapat dijadikan alternatif mitra pemasok alutsista karena memiliki kepentingan yang sejalan dengan Indonesia.

2) Kemudahan Akses terhadap Teknologi dan ToT dari negara Turki

Dalam beberapa dekade terakhir, industri pertahanan Turki telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Turki telah berhasil memproduksi berbagai macam senjata secara domestik, bahkan telah terbukti teruji di palagan perang internasional. Akibat dari suksesnya industri pertahanan dalam negeri Turki ini, negara-negara berkembang seperti Indonesia mulai melirik Turki untuk memasok alutsista demi memenuhi kebutuhan dalam negeri mereka. Jakarta telah menjalin kontrak dengan beberapa perusahaan pertahanan Turki seperti ASELSAN, TAIS, dan TAI untuk menyediakan alutsista darat, laut, hingga udara.

Hal ini tidak hanya didorong oleh keberhasilan industri dalam negeri Turki, tetapi juga oleh Turki yang telah memposisikan dirinya sebagai salah satu pemasok alutsista yang memiliki kebijakan relatif terbuka dalam hal akses teknologi dan transfer senjata kepada negara mitranya. Kementerian Pertahanan Turki sebagai lembaga yang

mengurusi kebijakan pertahanan dan berikut industrinya tidak mendorong kebijakan pembatasan ekspor persenjataan terhadap negara lain, dengan pengecualian adalah Israel (Bastian, 2024).

a) Rudal Balistik Taktis KHAN

Turki menerapkan pendekatan yang lebih fleksibel terhadap negara mitra dalam ekspor alutsista. Varian ekspor KHAN yang ditawarkan kepada Indonesia misalnya, tetap mempertahankan spesifikasi aktualnya dengan hanya pembatasan pada jangkauan sesuai yang diterapkan MTCR hingga ± 280 kilometer dengan akurasi *Circular Error Probable* (CEP) kurang dari atau sama dengan 10 meter. Meskipun mengalami penurunan jarak jangkau signifikan dari versi domestiknya, namun tetap menunjukkan komitmen Turki untuk memberikan kapabilitas yang mendekati aslinya.

Turki juga dikenal terbuka terhadap opsi kerja sama industri, baik dalam bentuk produksi bersama (*joint production*) maupun skema *offset* yang melibatkan mitra perusahaan pertahanan nasional. Pendekatan ini juga tampak pada fleksibilitas integrasi sistem peluncur KHAN yang dapat dipasang pada kendaraan 8×8 kustomisasi Indonesia, sehingga tidak mengunci pengguna pada platform buatan Turki semata. Contohnya Indonesia memilih untuk menggunakan platform Tatra buatan Ceko dibanding menggunakan platform truk buatan Turki. Indonesia menjadi salah satu negara di Asia Tenggara yang mengoperasikan sistem rudal balistik taktis setelah menerima KHAN pada Agustus 2025 (armyrecognition.com, diakses 25 Agustus 2025). Fakta bahwa Turki bersedia menjual rudal dengan kapabilitas strategis dan presisi tinggi, serta hanya melakukan sedikit pembatasan teknologi, menunjukkan perbedaan paradigma dari pemasok lain yang cenderung menurunkan spesifikasi ekspor.

b) Rudal Anti-Kapal ATMACA

Rudal ini merupakan salah satu jenis senjata buatan Turki yang akan digunakan dalam kapal fregat Merah Putih (www.roketsan.com.tr, diakses 25 Agustus 2025). Kerja sama ini berawal dari penandatanganan *framework agreement* pada Agustus 2024, yang mencakup pembangunan fasilitas *Maintenance, Repair, and Overhaul* (MRO) serta jalur produksi lokal untuk rudal ATMACA, Çakir, dan sistem pertahanan lainnya. Puncak kolaborasi tercapai pada ajang Indo Defence 2025, ketika ROKETSAN dan anak usaha Republikorp, PT Republik Defence Indonesia, menandatangani dua kontrak penting yaitu pengadaan rudal ATMACA beserta sistemnya, dan rencana pembentukan perusahaan patungan (www.roketsan.com.tr, diakses 25 Agustus 2025). Dari kesepakatan tersebut lahir PT Republik Roketsan Indonesia yang bertugas memproduksi sistem rudal utama di dalam negeri dengan dukungan penuh teknologi dan pelatihan dari Turki. Melalui model ini, Indonesia memperoleh akses langsung terhadap teknologi produksi rudal, kemandirian dalam perawatan dan modernisasi melalui fasilitas MRO lokal, serta pengembangan SDM ahli yang dilatih langsung oleh insinyur ROKETSAN.

Bagi Indonesia, kemudahan akses teknologi dan ToT dari Turki membuka peluang percepatan kemandirian industri pertahanan nasional. Melalui joint venture seperti PT Republik Roketsan Indonesia, Indonesia tidak lagi sekadar menjadi pengguna akhir tetapi juga produsen dan pengembang teknologi rudal. Hal ini sangat berbeda dengan pengalaman masa lalu ketika Indonesia membeli rudal MM40 Exocet dari Eropa yang tidak disertai dengan transfer teknologi maupun *offset* signifikan. Meskipun digunakan dalam jumlah besar dan menjadi tulang punggung sistem rudal anti-kapal TNI AL, *offset* yang diberikan oleh Eropa hanya berupa instalasi sistem rudal ke kapal oleh PT PAL (www.indomiliter.com, diakses 25 Agustus

2025). Dengan demikian, Indonesia tetap berada dalam posisi sebagai konsumen murni tanpa mendapatkan nilai tambah dalam pengembangan industri pertahanan domestik.

Kini, melalui pola kerja sama dengan Turki, Indonesia memiliki peluang untuk mengurangi ketergantungan pada impor penuh, memperkuat ekosistem industri pertahanan nasional, serta meningkatkan potensi ekspor produk pertahanan ke pasar regional. Meski demikian, tantangan seperti kebutuhan investasi besar, kesiapan infrastruktur industri, dan pengelolaan teknologi sensitif tetap perlu diantisipasi agar manfaat kerja sama ini benar-benar optimal.

Sikap terbuka Turki dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, Turki sedang berupaya memperluas pasar industri pertahanannya di kancah global. Untuk memenangkan persaingan, mereka menawarkan teknologi dengan kapabilitas tinggi dan pembatasan minimal. Kemudian, Turki memiliki fleksibilitas lebih besar dalam ekspor senjata karena meskipun menjadi anggota NATO, mereka tidak selalu mengikuti kebijakan ekspor ketat yang dianut oleh beberapa anggota aliansi lainnya, sehingga dapat menjalin kerja sama dengan lebih banyak negara tanpa hambatan politis yang besar.

Kebijakan ekspor yang terbuka ini memberikan keuntungan strategis bagi Indonesia. Akses ke teknologi tinggi tanpa modifikasi signifikan meningkatkan kemampuan deteren nasional, sementara peluang untuk mengembangkan industri pertahanan dalam negeri melalui kerja sama teknis dan produksi bersama semakin terbuka. Selain itu, diversifikasi sumber alutsista mengurangi ketergantungan pada pemasok tradisional, memperkuat otonomi strategis Indonesia. Dalam industri pertahanan global, akses terhadap teknologi mutakhir sering menjadi faktor penentu bagi suatu negara untuk mempertahankan kedaulatannya. Sebagian besar negara produsen persenjataan canggih seperti Amerika Serikat, Rusia,

atau negara-negara Eropa Barat menerapkan pembatasan ketat terhadap ekspor teknologi dan *transfer of technology* (ToT).

3) Alutsista Turki Terjangkau dan Berstandar NATO

Salah satu pertimbangan utama dalam kebijakan pengadaan Alutsista Indonesia adalah keterbatasan anggaran pertahanan. Pagu anggaran pertahanan untuk tahun 2025 sendiri mencapai hingga Rp. 165,16 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp. 139 triliun (www.antaranews.com, diakses 25 Agustus 2025). Secara angka, anggaran pertahanan ini terlihat besar, namun jika mempertimbangkan dengan luas wilayah Indonesia dan perbandingan dengan ekonomi maka anggaran tersebut terbikang cukup kecil. Jika dibandingkan dengan persentase PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia, anggaran pertahanan Indonesia hanya mencapai 0,7-0,8% dari total PDB (en.antaranews.com, diakses 25 Agustus 2025).

Dalam konteks ini, harga dan efisiensi biaya menjadi faktor strategis dalam menentukan mitra pemasok Alutsista. Turki menawarkan solusi yang relatif lebih terjangkau dibandingkan negara-negara Barat, tanpa mengorbankan kualitas dan kapabilitas teknologi. Beberapa produk pertahanan Turki, seperti kendaraan tempur lapis baja FNSS, drone tempur Bayraktar TB2, dan kapal fregat kelas MILGEM, memiliki harga yang kompetitif yang lebih murah dibandingkan produk sekelas buatan Amerika Serikat atau Eropa Barat. Tulang punggung rudal anti kapal TNI AL saat ini Adalah rudal MM40 Exocet buatan konsorsium Eropa MBDA. Harga per unit rudal MM40 Block 3C Exocet jika dilihat dari pengadaan Yunani, untuk 16 unit rudal dihargai senilai €33 juta atau sekitar €2,06 juta (www.navalnews.com, diakses 25 Agustus 2025). Sedangkan rudal Harpoon buatan AS yang dulu pernah menjadi tulang punggung rudal anti kapal TNI AL pada masa orde baru, harganya mencapai \$1 juta per unit. Di lain sisi, rudal ATMACA buatan Turki yang akan digunakan dalam kapal Fregat Merah Putih dihargai setengah dari harga rudal AS yaitu senilai \$500,000 (turkishminute.com, diakses 25 Agustus 2025).

Hal ini membuat rudal anti-kapal buatan Turki lebih terjangkau untuk diakuisisi dan karena itu dapat dibeli dalam jumlah lebih banyak untuk memaksimalkan ToT dan *offset* yang bisa didapat. Selain itu rudal ATMACA juga lebih unggul secara spesifikasi di mana rudal MM40 Block 3 memiliki jangkauan hingga 200 km dan hulu ledak hanya sebesar 165kg. Sedangkan rudal ATMACA memiliki jangkauan hingga 250 km dan hulu ledak mencapai hingga 220kg. Selain harga yang murah, Alutsista buatan Turki pun memiliki standar NATO yang terbukti kualitasnya dan juga menjadi standar di Indonesia. Rudal ATMACA sendiri didasarkan pada kebutuhan angkatan bersenjata Turki yang memiliki standar NATO. Rudal ini dapat terintegrasi dengan datalink buatan barat seperti Link-16 dan Link Y yang mana juga digunakan oleh Indonesia. Sehingga adanya integrasi dengan sistem NATO ini tetap dapat menjaga interoperabilitas antar Alutsista TNI dan produk senjata dalam negeri yang mayoritas berstandar NATO.

Independent Variables

1) Kemandirian Industri Pertahanan Indonesia

Kemandirian pertahanan Indonesia merupakan manifestasi dari cita-cita nasional untuk membangun kekuatan pertahanan yang mandiri, modern, dan berdaya saing global. Indonesia pernah berusaha untuk mencapai kemandirian tersebut sejak era Orde Baru melalui konsep “berawal di akhir dan berakhir di awal” yang dicetuskan oleh BJ Habibie (Hasil Wawancara, 2025). Namun konsep itu tidak terlaksana dengan baik akibat dari adanya krisis moneter yang melanda Indonesia saat itu dan desakan dari IMF untuk menghentikan proyek-proyek nasional. Meskipun demikian, keinginan akan kemandirian pertahanan mulai tercetus kembali ketika Indonesia berencana memperkuat kembali pertahanannya pasca embargo yang berakhir pada 2005.

Pengalaman pahit embargo senjata oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa pada periode 1999–2005 menjadi katalis utama percepatan kebijakan kemandirian pertahanan. Embargo ini meliputi larangan

pengiriman suku cadang dan pelatihan militer, yang secara langsung menghambat operasional alutsista seperti pesawat F-16, F-5, dan C-130 (Hasil Wawancara, 2025). Ketika Tsunami menghantam Aceh pada 2004 misalnya, hampir seluruh armada C-130 Hercules Indonesia tidak dapat terbang dan mengakibatkan operasi militer selain perang (OMSP) dalam membantu korban bencana menjadi terhambat. Trauma embargo ini mendorong pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada pemasok tunggal, melakukan diversifikasi mitra pertahanan, dan membangun kemampuan produksi dalam negeri. Hal ini memperkuat urgensi kebijakan seperti Undang-Undang No. 16 Tahun 2012, dan mendorong pemerintah untuk mempercepat akuisisi kemampuan memproduksi produk-produk pertahanan. Percepatan akuisisi teknologi ini dilakukan dengan mengakuisisi teknologi yang sudah teruji secara langsung dari luar negeri melalui ToT dan *offset*.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan menegaskan kewajiban penerapan mekanisme Transfer of Technology (ToT) dan *offset* dalam setiap pengadaan alat pertahanan dari luar negeri. Kebijakan ini bertujuan memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional, mengurangi ketergantungan terhadap impor, serta memastikan alih teknologi dan pengetahuan strategis kepada industri dalam negeri (Hasil Wawancara, 2025). Kewajiban ToT/*offset* ini muncul sebagai respon dalam menghadapi risiko dari ancaman embargo. Embargo tersebut memperlihatkan kerentanan Indonesia akibat ketergantungan pada pasokan luar negeri. Oleh karena itu, UU No. 16 Tahun 2012 mewajibkan bahwa setiap pengadaan alat pertahanan dari luar negeri harus disertai dengan program *offset* yang dapat berupa imbal dagang, kandungan lokal, dan/atau kerja sama produksi.

Dengan adanya kewajiban ToT/*offset* sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2012, Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat untuk memastikan bahwa setiap pengadaan alat pertahanan dari luar negeri memberikan manfaat ganda yaitu pemenuhan kebutuhan alutsista dan penguatan kapasitas industri pertahanan nasional.

Kebijakan ini juga menjadi bagian integral dari strategi kemandirian pertahanan yang berkelanjutan, sekaligus sebagai jawaban atas pelajaran dari masa lalu akibat embargo militer.

Turki menjadi salah satu mitra yang mampu memenuhi persyaratan tersebut. Proyek Kaplan/Harimau Medium Tank yang dikembangkan oleh FNSS (Turki) dan PT Pindad (Indonesia) adalah contoh nyata penerapan ketentuan UU tersebut. Dalam proyek ini, terjadi alih teknologi secara langsung melalui pelibatan insinyur Indonesia diproses desain dan produksi, serta pembangunan fasilitas produksi di dalam negeri. Demikian pula, rencana kerja sama produksi Kendaraan Lapis Baja Amfibi dan Harimau APC yang melibatkan produksi di Bandung dan penguasaan teknologi untuk pemeliharaan serta peningkatan kemampuan di masa depan.

Selain ToT, mekanisme *offset* juga diimplementasikan dalam bentuk pelatihan teknis, pengembangan rantai pasok komponen dalam negeri, dan kesempatan bagi perusahaan BUMN maupun swasta nasional untuk menjadi bagian dari ekosistem industri pertahanan global Turki. Hal ini tentunya sejalan dengan UU No. 16 Tahun 2012 yang mewajibkan keterlibatan industri dalam negeri dalam setiap kontrak pengadaan luar negeri.

2) Strategi Diversifikasi Pertahanan

Strategi diversifikasi pertahanan merupakan kebijakan pertahanan Indonesia yang telah berlangsung sejak lama, di mana pemerintah berupaya untuk tidak bergantung pada satu negara pemasok senjata. Pendekatan ini lahir dari pengalaman historis, khususnya trauma embargo militer yang dialami Indonesia pada awal 2000-an ketika Amerika Serikat membekukan sebagian besar kerja sama militer dan pasokan suku cadang untuk alutsista buatan mereka. Dengan menyebarkan sumber pengadaan dari berbagai negara, Indonesia dapat memastikan keberlangsungan modernisasi pertahanan meski terjadi ketegangan diplomatik dengan salah satu pemasok. Dalam kerangka diversifikasi ini, Turki menjadi salah satu

mitra penting. Keputusan ini didasarkan pada beberapa faktor strategis.

Pertama, Turki memiliki reputasi positif dalam memenuhi kontrak pertahanan dan bersedia menerapkan transfer of technology (ToT) serta *offset* sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Hal ini dapat dilihat dari hasil kerja sama kedua negara yang dapat dikatakan berhasil seperti tank medium Harimau. Kedua, Turki dianggap memiliki kemungkinan kecil untuk melakukan embargo terhadap Indonesia, mengingat kedua negara memiliki latar belakang geopolitik yang serupa. Turki dan Indonesia sama-sama pernah menjadi korban embargo Barat dan memiliki pengalaman menghadapi tekanan eksternal.

Faktor lain yang memperkuat persepsi ini adalah posisi Turki yang pada tahun 2019 terancam sanksi CAATSA (*Countering America's Adversaries Through Sanctions Act*) dari Amerika Serikat akibat pembelian sistem pertahanan udara S-400 dari Rusia (Hasil Wawancara, 2025). Situasi tersebut menunjukkan bahwa Turki juga berpotensi menjadi sasaran tekanan internasional, sehingga cenderung memahami pentingnya kemandirian pertahanan dan solidaritas dengan negara-negara yang menghadapi risiko serupa. Dengan latar belakang tersebut, kemitraan Indonesia–Turki melalui pengadaan sistem senjata untuk kapal fregat Merah Putih tidak hanya memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global pertahanan. Akan tetapi, juga selaras dengan strategi diversifikasi yang telah lama menjadi pilar kebijakan pertahanan nasional Indonesia untuk menghindari risiko dari ancaman embargo.

3) Peran Kementerian Pertahanan dan KKIP

Menurut teori Pion-Berlin, hubungan sipil-militer di Indonesia berada pada Model ke-4, di mana posisi Menteri Pertahanan setara dengan Panglima TNI. Kondisi ini membuat pengadaan alutsista cenderung bersifat *bottom-up*, meskipun Kementerian Pertahanan melalui KKIP tetap memiliki peran besar dalam mengoordinasikan dan

mengawasi kebijakan industri pertahanan, sehingga sering kali kebijakan Kemhan berjalan berbeda dari usulan TNI (Hasil Wawancara, 2025).

Sejak akhir 2019, Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan menunjukkan kecenderungan mempererat kerja sama pertahanan dengan Turki. Intensitas kunjungan resmi, pertemuan langsung dengan Presiden Erdoğan, Menteri Pertahanan Hulusi Akar, Ketua SSB Ismail Demir, hingga kunjungan ke Armada Laut Turki, memperlihatkan keseriusan Indonesia dalam membangun hubungan strategis (www.aa.com.tr, diakses 25 Agustus 2025). Hal ini diperkuat dengan pelaksanaan *The 8th Defence Industry Cooperation Meeting* (DICM) di Jakarta, yang sejak 2011 menjadi forum penting membahas rencana kerja sama jangka panjang, termasuk produksi alutsista strategis. Pada 2020, Prabowo kembali berkunjung ke Turki untuk membahas kerja sama UAV dan kendaraan tempur lapis baja (www.aa.com.tr, diakses 25 Agustus 2025). Dukungan politik domestik juga muncul, salah satunya dari Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, yang menegaskan pentingnya hubungan dengan Turki serta menyoroti frekuensi kunjungan resmi Prabowo (ekonomi.bisnis.com, diakses 25 Agustus 2025). Momentum ini berlanjut pada Indo Defence 2022, di mana ditandatangani sejumlah kontrak dengan industri pertahanan Turki, meliputi CMS kapal perang, sistem anti-drone, rudal SSM, dan SAM (www.kompas.tv, diakses 25 Agustus 2025).

Meningkatnya intensitas kerja sama tersebut menunjukkan peran dominan Kementerian Pertahanan dan KKIP dalam merumuskan kebijakan pertahanan. Kerja sama dengan Turki dinilai strategis karena sesuai dengan amanat UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, khususnya terkait mekanisme transfer of technology dan *offset*. Dengan demikian, pengadaan alutsista dari Turki dalam proyek Fregat Merah Putih bukan sekadar keputusan teknis, melainkan keputusan strategis untuk memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional.

3. KESIMPULAN

Kebijakan luar negeri Indonesia dalam memilih Turki sebagai mitra pemasok sistem senjata pada kapal fregat Merah Putih secara tegas merefleksikan strategi nasional dalam membangun kekuatan pertahanan nasional sebagai negara yang berdaulat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemilihan Turki bukanlah semata hasil dari dinamika politik luar negeri, melainkan lebih merupakan refleksi dari kebijakan dalam negeri Indonesia dalam sektor pertahanan. Kebijakan tersebut dibangun di atas dua pilar utama, yaitu upaya untuk mewujudkan kemandirian pertahanan melalui penguasaan teknologi serta penguatan industri strategis nasional, dan strategi diversifikasi kerja sama pertahanan guna menghindari risiko ketergantungan terhadap satu negara pemasok.

Strategi diversifikasi alutsista Indonesia berangkat dari pengalaman embargo Barat yang menimbulkan kerentanan pertahanan. Dalam konteks penelitian ini, Turki dipandang sebagai mitra strategis karena mampu menyediakan persenjataan berkualitas dengan harga terjangkau, sekaligus mengurangi risiko diplomatik seperti pada UU CAATSA berkat posisinya sebagai anggota NATO atau *non-adversaries* bagi Barat. Selain itu, kesediaan Turki memberikan mekanisme transfer teknologi (ToT) dan *offset* sesuai amanat Undang-Undang memperkuat kapasitas industri pertahanan nasional.

REFERENSI

- [ANALYSIS] The Atmaca cruise missile will make the Turkish Navy a more effective deterrent - Turkish Minute.
<https://turkishminute.com/2021/09/08/he-atmaca-cruise-missile-will-make-the-turkish-navy-a-more-effective-deterrent/>
- A Hikmawanti. "Dependensi Positif Antara Indonesia-Amerika Serikat Dalam Penguatan Ketahanan Militer Pasca Embargo Militer Tahun 2005." *Jurnal Ketahanan Nasional*, vol. 29, 2023, hlm. 90–107
- Adestria, E., H. Almubaroq, and A. Risdhianto. "Evaluation of the Minimum Essential Force Program on the Independence of the Indonesian Defense Industry." *The Management Journal of Binaniaga*, 2024, <https://doi.org/10.33062/mjb.v9i02.67>.
- Arms Control Association. "U.S. Lifts Indonesia Arms Embargo." *Arms Control Today*, Jan. 2006, <https://www.armscontrol.org/act/2006-01/us-lifts-indonesia-arms-embargo>.

- Bastian, Jens. Turkey: An Emerging Global Arms Exporter. Growing Competitiveness and Strategic Recalibration of the Turkish Defence Industry. 2024.
- Creswell, John W. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. 5th ed., SAGE Publications, 2018, hlm, 254.
- Embargoed Countries 2025. <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/embargoed-countries?> Accessed 22 Aug. 2025.
- EuroSD. "Type 31 Arrowhead 140 Frigate Programmes Status Report." EuroSD, 23 Oct. 2023, <https://euro-sd.com/2023/10/articles/34033/type-31-arrowhead-140-frigate-programmes-status-report/>.
- Garrett Reim, "MAKS: US Sanctions Make Air Forces Wary of Russian Jets," FlightGlobal, August 28, 2019a.
- Greece Orders Exocet MM40 Block 3C Anti-Ship Missiles - Naval News. <https://www.navalnews.com/naval-news/2025/04/greece-orders-exocet-mm40-block-3c-anti-ship-missiles/>
- Indonesia Acquires Tactical Strike Capability for First Time with Arrival of Turkish KHAN Ballistic System. <https://armyrecognition.com/news/army-news/2025/indonesia-acquires-tactical-strike-capability-for-first-time-with-arrival-of-turkish-khan-ballistic-system?> Diakses 22 Agustus 2025.
- Indonesia dan Turki Jalin Kerja Sama di Indo-Defence, Kemhan Beli Kapal dan Sistem Rudal. <https://www.kompas.tv/nasional/345986/indonesia-dan-turki-jalin-kerja-sama-di-indo-defence-kemhan-beli-kapal-dan-sistem-rudal>.
- Indonesia plans defense budget hike to 1.5 percent of GDP - ANTARA News. <https://en.antaranews.com/news/341690/indonesia-plans-defense-budget-hike-to-15-percent-of-gdp?>
- Indonesia's Merah Putih-class Frigate: What You Need to Know - Naval News. <https://www.navalnews.com/naval-news/2025/02/indonesias-merah-putih-class-frigate-what-you-need-to-know/>. Diakses 19 Juni 2025.
- Indonesian Navy Commissions 2 KCR-60M Fast Attack Craft - Naval News. <https://www.navalnews.com/naval-news/2023/05/indonesian-navy-commissions-2-kcr-60m-fast-attack-craft/>. Diakses 19 Juni 2025.
- Indonesia-Turki tegaskan komitmen kerja sama industri pertahanan. <https://www.aa.com.tr/id/nasional/indonesia-turki-tegaskan-komitmen-kerja-sama-industri-pertahanan/1659842?>
- Inkiriwang, F. (2020). The dynamic of the US-Indonesia defence relations: the 'IMET ban' period. Australian Journal of International Affairs, 74, 377 - 393. <https://doi.org/10.1080/10357718.2020.1712327>.
- Kemenhan: Pagu anggaran pertahanan 2025 naik dibanding pagu indikatif - ANTARA News. <https://www.antaranews.com/berita/4304959/kemenhan-pagu-anggaran-pertahanan-2025-naik-dibanding-pagu-indikatif?>
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. <https://www.kemhan.go.id/2017/04/07/menhan-resmkian-kri-raden-eddy-martadinata-331-kapal-pkr-pertama-dibangun-di-dalam-negeri.html>. Diakses 19 Juni 2025.

- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Kebijakan Industri Pertahanan. 2012, <https://www.kemhan.go.id/ppid/wp-content/uploads/sites/2/2016/10/Permenhan-Nomor-19-Tahun-2012-Lampiran-1.pdf>.
- Luerdi, ., dan Hizra Marisa. "Determinants of Indonesia's Defense Technology Cooperation with Turkey: A Decision Making Perspective." 2020, hlm. 440–45, <https://doi.org/10.5220/0009370304400445>.
- Menhan Prabowo kunjungi Turki bahas kerja sama industri pertahanan. <https://www.aa.com.tr/id/dunia/menhan-prabowo-kunjungi-turki-bahas-kerja-sama-industri-pertahanan/1919413?>
- Mochtar, Mas'ood. "Ilmu hubungan internasional: Disiplin dan metodologi." Jakarta: LP3ES (1994), hlm 308.
- Parachini, John V, et al. Impact of the U.S. and Allied Sanction Regimes on Russian Arms Sales. RAND Corporation, 2021, <https://doi.org/10.7249/RR1341-1>.
- Roketsan - Roketsan Strengthens Collaborations in Indonesia: Two New Contracts Signed. <https://www.roketsan.com.tr/en/media/news/roketsan-strengthens-collaborations-indonesia-two-new-contracts-signed?> Diakses 22 Agustus 2025.
- Rose, Gideon. "Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy." *World Politics*, vol. 51, no. 1, 1998, pp. 144–72. JSTOR, <http://www.jstor.org/stable/25054068>. Accessed 22 June 2025.
- Terkait Program Offset, PT PAL Indonesia Gandeng MBDA untuk Upgrade Korvet Bung Tomo Class. <https://www.indomiliter.com/terkait-program-offset-pt-pal-indonesia-gandeng-mbda-untuk-upgrade-korvet-bung-tomo-class/?>
- Tiga Kapal Perang MLRF Buatan Inggris Perkuat Koarmatim | Website Tentara Nasional Indonesia. <https://tni.mil.id/view-66471-tiga-kapal-perang-mlrf-buatan-inggris-perkuat-koarmatim.html>. Diakses 19 Juni 2025.
- Wawancara dengan Mayjen TNI (Purn) Witjaksono, M.Sc. NSS.: Ahli Pertahanan & Mantan Atase Pertahanan RI di Afrika Selatan (2003-2006) dan Amerika Serikat (2011-2013). 3 Agustus 2025. Zoom